SUARA PEMRED

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des 2019 Hal.:9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31

APIP Pontianak Diklaim Level Baik

PONTIANAK, SP - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kota Pontianak saat ini sudah berada pada level tiga atau baik. APIP level tiga tidak banyak dimiliki daerah lainnya. Peran APIP sebagai telinga dan mata kepala daerah bisa memberikan nilai pekerjaan yang lebih efisien dan tepat guna.

• Baca Halaman 15

Hal 9 apip pontianak

"Tadi juga disampaikan Kota Pontianak salah satu kota yang diapresiasi dengan APIP level tiga," ucap Edi, Selasa (29/10).

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi hasil pengawasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka menindaklanjuti LHP dari BPK dan BPKP.

Dirinya menyebutkan/ BPK mengharuskan Pemerintah Kota Pontianak untuk menyelesaikan beberapa tingkatan.

Edi menambahkan APIP yang sudah pada level tiga memberikan semangat bagi pemerintah untuk terus berupaya menjalankan tata kelola pemerintahan yang

sudah pada jalurnya untuk ditingkatkan kualitasnya. Peningkatan tersebut diharapkan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Tidak semua kabupaten kota, termasuk provinsi, memiliki APIP dengan level tiga," ucapnya.

Edi juga menyingung soal temuan BPK yang akan terus diturunkan kelasnya dari tingkat empat hingga mencapai tingkat satu. Temuan tersebut juga tidak mudah ditindaklanjuti karena berkaitan dengan orang yang bersangkutan telah meninggal atau sudah tidak menjabat.

Ia memastikan potensi untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan tetap besar. Terkait persoalan aset akan terus dilakukan tata kelola yang baik, sehingga aset bisa bermanfaat untuk pembangunan.

Dirinya menyebutkan beberapa persoalan masih terjadi terkait pengelolaan aset. Di antaranya ada permasalahan aset yang secara de facto dikuasai Pemerintah Kota Pontianak, tapi surat-suratnya masih belum lengkap karena ada permasalahan.

Namun, ada juga yang secara surat-surat dimiliki Pemerintah Kota Pontianak tapi di lapangan diduduki oleh masyarakat.

"Ini yang akan kita genahkan bersama beberapa pihak terkait," pungkasnya. (din/bah)